

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN DANA BANTUAN SOSIAL BANJIR DIKECAMATAN TIKALA KOTA MANADO

MICHELLE E L KEMBUAN
FLORENCE DEISY JETTY LENGKONG
HELLY KOLON DAM
VERY YOHANIS LONDA
Michellekembuan2705@gmail.com

Abstrak : Implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana banjir dengan memperbaiki pemukiman warga yang hancur dan sudah tidak layak untuk di tempati namun kenyataannya kebijakan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal, oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir di Kecamatan Tikala. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dimana dalam implementasi kebijakan dilihat dari 6 variabel yang berpengaruh besar dalam implementasi kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan adalah penting karena implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan kebijakan. Komunikasi merupakan informasi bagi pemerintah untuk menginformasikan kebijakan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Karakteristik agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan. Disposisi adalah sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti etika dan komitmen untuk membuat kebijakan ini berhasil. Kondisi sosial ekonomi dan politik adalah menilai kinerja implementasi sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara kepada 7 orang informan, observasi secara langsung dan penelusuran dokumen yang ada kaitannya dengan kebijakan, bahkan dalam penelitian dibantu dengan adanya pedoman wawancara, alat perekam dan alat tulis menulis. Hasil penelitian secara umum menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di Kecamatan Tikala belum berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendistribusian Dana Bantuan Banjir

Abstract : The implementation of the flood social assistance fund distribution policy aims to help people affected by the floods by repairing destroyed residential settlements that are not feasible to be occupied but in reality the policies carried out have not run optimally, therefore this study is intended to answer the question of how to implement policy of distributing flood social assistance funds in Tikala District. In this study researchers used an implementation model of Donald Van Meter and Carl Van Horn, where in policy implementation it was seen from 6 variables that had a major influence on policy implementation. Policy standards and objectives are important because successful policy implementation can fail when implementers are not fully aware of policy standards and objectives. Adequate resources both human resources and financial resources will influence the success rate of the policy. Communication is an information tool for the government to inform policy to the community as a target group. Characteristics of implementing agents include formal organizations and informal organizations involved in implementing policies. Disposition is an attitude that is carried out by policy implementers such as ethics and commitment to make this policy successful. Socio-economic and political conditions are assessing the implementation performance to the extent that the external environment contributes to the success of public policy. In this study using descriptive qualitative research methods, namely through interviews with 7 informants, direct observation and tracking of documents related to policy, even in research assisted by the existence of interview guidelines, recording devices and writing instruments. The results of the study generally explain that the Implementation of the Policy for the Distribution of Flood Social Assistance Funds in Tikala District has not run optimally.

Keyword: Policy Implementation, Distribution of Flood Relief Funds

PENDAHULUAN

Berdasarkan pembukaan UUD RI Tahun 1945 pada alinea ke empat yang menyatakan antara lain bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”. Di kecamatan Tikala, tercatat ada 5 kelurahan masing-masing kelurahan mempunyai aliran sungai yang dapat berpotensi banjir. Banjir yang melanda daerah-daerah rawan di kecamatan Tikala khususnya kelurahan-kelurahan yang sering terkena bencana banjir, pada dasarnya disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan kurangnya resapan air sehingga menyebabkan banjir.

Banjir bukan hanya merusak fasilitas prasarana publik tetapi juga meluluhlantakkan pemukiman warga. Meskipun partisipasi masyarakat kecamatan Tikala dalam penanggulangan banjir sangat nyata terutama pada aktivitas tanggap darurat namun, bencana banjir menyebabkan tambahan beban anggaran untuk memperbaiki pemukiman warga yang hancur dan sudah tidak layak untuk di tempati.

Banjir bukan hanya merusak fasilitas prasarana publik tetapi juga meluluhlantakkan pemukiman warga. Meskipun partisipasi masyarakat kecamatan Tikala dalam penanggulangan banjir sangat nyata terutama pada aktivitas tanggap darurat namun, bencana banjir menyebabkan tambahan beban anggaran untuk memperbaiki pemukiman warga yang hancur dan sudah tidak layak untuk di tempati. Berbagai upaya pemerintah di tiap-tiap kelurahan ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir di

kecamatan Tikala. Penanggulangan banjir yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini hanya terfokus pada aturan untuk tidak membuang sampah di sungai atau selokan.

Kepala-kepala lingkungan di kecamatan Tikala menjelaskan bahwa Kecamatan Tikala mempunyai aliran sungai yang bermuara dari Danau Tondano, dan beberapa warga masih menempati pemukiman dekat aliran sungai. Sehingga ketika hujan dengan intensitas yang tinggi maka air danau yang ada di Tondano akan meluap sampai ke aliran sungai di Manado yaitu aliran sungai Kecamatan Tikala. Banyak cara yang sudah pemerintah kota lakukan untuk mencegah datangnya banjir seperti memperbaiki sistem resapan air dan gotong royong di tiap kelurahan, namun semuanya itu tidak akan optimal tanpa kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah Kota Manado juga turut peduli dengan bencana sosial seperti bencana banjir yang terjadi pada Tahun 2014 sampai 2017 kemarin. Oleh sebab itu BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado) bekerjasama dengan kecamatan setempat memberikan sumbangan dana ketiap-tiap kelurahan untuk memperbaiki tempat tinggal yang sudah terkena banjir.

Dana yang telah disalurkan pemerintah Kota Manado belum terbagi secara merata di tiap-tiap kelurahan, jadi warga setempat masih tetap berupaya untuk menunggu kebijakan dari pemerintah kota tentang implementasi dana bantuan sosial banjir yang belum merata di tiap kecamatan yang ada di Tikala. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk

dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Banyak variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi sosial dan politik, komunikasi antar organisasi terkait atau kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan diharapkan dapat bekerja sama guna mewujudkan tujuan Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di Kecamatan Tikala Kota Manado yang telah di tetapkan.

Konsep Implementasi

Secara umum Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Konsep Kebijakan

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah-masalah publik atau masalah-masalah pemerintah yang ada pada suatu negara. Kenyataannya kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik dapat dikatakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat.

Pengertian dari kebijakan dikemukakan oleh Anderson (Wahab 2005) sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Konsep tersebut membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan di antara sejumlah alternatif yang tersedia.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djadja Saefullah (2006) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif yakni:

Pertama, perspektif politik bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan

berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan.

Kedua, perspektif administratif bahwa kebijakan publik merupakan ihwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang di inginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas.

1. Teori Implementasi Kebijakan
 - a. Teori George C. Edwards III (2004)
Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi (2) sumberdaya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.
 - b. Teori Merilee S. Grindle keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Wibawa (2005) yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. Variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa indikator yaitu:

1. Kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
3. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
4. Letak pengambilan keputusan.
5. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
6. Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Konsep Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial serta melindungi masyarakat dari risiko-risiko sosial yang mungkin timbul. Untuk melaksanakan hal tersebut, negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan spesifik. Khusus untuk penjaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memiliki satu pos yang

dinamakan bantuan sosial (Bansos) di dalam APBN.

Pengertian bantuan sosial dapat dibaca di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 1 angka 15, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Penyaluran dana bantuan untuk korban banjir di Kecamatan Tikala ditangani oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditemani

konsultan. Kelompok masyarakat buat pokmas kemudian menunjuk ketua, sekretaris, bendahara, lalu dibuatkan rekening untuk masing-masing pokmas. Bantuan dari kas daerah Kota Manado langsung ke rekening pokmas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Budi Yasin.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2006), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Bungin (2010) bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Nasution (2001) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian kualitatif pada umumnya merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan atau menguji hipotesis (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta dan menganalisis dan menafsirkan data, tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis.

Fokus Penelitian

Cara pengukuran variabel penelitian biasanya dirumuskan dalam apa yang disebut definisi konsep dan definisi operasional. Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemerintah pada pendistribusian dana bantuan sosial banjir di Kecamatan Tikala Kota Manado. Definisi konsep dari fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human*

- resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resource*).
3. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
 4. Sikap para pelaksana (Disposisi) adalah sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti etika dan komitmen untuk membuat kebijakan ini berhasil.
 5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
 6. Komunikasi merupakan informasi bagi pemerintah untuk menginformasikan kebijakan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Sumber Data (Informan)

Menurut Lofland dalam (Moleong, 2006) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Pada penelitian kualitatif tidak ada pengambilan sumber data yang acak, tetapi menggunakan teknik purposive atau pengambilan sumber data berdasarkan tujuan atau secara sengaja.

Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data/informan. Data primer yang dikumpulkan adalah data bersifat kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan sumber data/informan.

Selain data primer juga dikumpulkan data sekunder yaitu data yang telah terolah dan tersedia di lokasi penelitian yaitu Kantor Kecamatan Tikala Kota Manado. Data sekunder yang terkumpul akan berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri, sedangkan metode/teknik pengumpulan datanya adalah pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan penelaahan dokumen. Menurut Moleong (2006) bahwa penggunaan metode tersebut memiliki beberapa keuntungan yaitu :

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak;
2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden;
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut maka mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan teknik penelitian sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview) yaitu ;melakukan wawancara atau dialog langsung dengan para informan

dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, dan diperluas dengan wawancara bebas. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer.

2. Pengamatan (Observasi) yaitu ;melakukan pengamatan secara langsung terhadap peristiwa/fenomena yang terkait dengan fokus penelitian yaitu implementasi pemerintah pada pendistribusian dana bantuan sosial banjir. Data yang diperoleh melalui observasi ini akan berfungsi melengkapi data primer hasil wawancara.
3. Penelaahan Dokumen yaitu ;melakukan pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang telah tersedia di Kantor Kecamatan Tikala. Data yang dikumpulkan disini merupakan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam (Rohididan Mulyono, 1992) dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada informan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di

lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

- c. Penyajian data yaitu data yang telah direduksi dan dianalisis disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah pemahaman, penafsiran data dan penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu langkah terakhir dari analisis kualitatif.

HASIL PEMBAHASAN

Deskripsi hasil wawancara

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam metode penelitian bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di Kecamatan Tikala Kota Manado, implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial ini merupakan sebuah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kota Manado khususnya di Kecamatan Tikala.

Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan yang dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado maka penulis melakukan wawancara kepada 7 orang pelaksana kegiatan (Implementor) dan informan penerima kebijakan (Masyarakat). Dalam penelitian ini implementasi tersebut dilihat dari beberapa indikator implementasi dari kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir, yaitu : 1) standar dan sasaran kebijakan 2) sumber daya 3) karakteristik agen pelaksanaan 4) sikap para pelaksana 5) komunikasi antar organisasi 6) lingkungan sosial ekonomi dan politik.

Hasil wawancara kepada informan mengenai fokus penelitian tersebut dideskripsikan sebagai berikut :

a) Informan M. T (Kepala BPBD Kota Manado)

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Rekonstruksi juga merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan dan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Jumlah warga Kecamatan Tikala yang menerima bantuan renovasi dengan dana 20 juta rupiah ada 1738 rumah dan 40 juta rupiah ada 1280 rumah. Untuk Relokasi 40 juta rupiah untuk 1000 rumah. Meski terbilang lama, namun pemerintah tetap merealisasikan bantuannya terhadap korban banjir bandang di Kota Manado tahun 2015 sampai bulan Desember 2017 kemarin. Dana yang sudah dikucurkan pemerintah pusat menembus angka 343 miliar rupiah. Tahapan dikucurkannya bantuan pada Tahun 2015 pemerintah memberikan 213 miliar rupiah. Kemudian Tahun 2016 kembali dikucurkan 14,3 miliar rupiah. Total dana yang masuk ke

Pemerintah Kota Manado untuk membantu korban banjir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencapai 343 miliar rupiah.

b) Informan B. Y (Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Manado)

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyaluran dana bantuan untuk korban banjir di Kecamatan Tikala ditangani oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditemani

konsultan. Kelompok masyarakat buat Pokmas kemudian menunjuk ketua, sekretaris, bendahara, lalu dibuatkan rekening untuk masing-masing Pokmas. Bantuan dari kas daerah Kota Manado langsung ke rekening Pokmas. Sebagian dana dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang rusak akibat banjir, misalnya pembuatan jembatan. Khusus bantuan kepada korban banjir di Tahun 2017 masih di kas daerah belum disalurkan. Hanya memastikan bantuan ke korban bencana akan diatur sehingga langsung masuk ke rekening para korban. Untuk rumah kategori rusak berat bantuan yang diberikan 40 juta rupiah, sedangkan yang

rusak dengan kategori sedang 20 juta rupiah. Dana bantuan ini tak disalurkan sekaligus pemerintah, melainkan secara bertahap, yakni tahap pertama sebanyak 40 persen, tahap kedua 30 persen dan tahap ketiga 30 persen. Jadi dana bantuan disalurkan 100 persen, untuk masyarakat yang memanfaatkan dana dengan benar.

Rangkuman Hasil Penelitian

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 7 orang informan, telah diuraikan dan dideskripsikan, maka dapat dibuat rangkuman sesuai dengan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan : SK Kepala BPBD Kota Manado no. 16 Tahun 2015 tentang : Penetapan standar pelayanan pada jenis pelayanan pada jenis pelayanan penyediaan kebutuhan dasar-dasar korban bencana. Semua informan mengatakan bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam pendistribusian dana bantuan sosial banjir sudah tertata dengan jelas dan mudah untuk dilakukan, prosedur-prosedur atau mekanisme implementasi kebijakan yaitu masyarakat yang ingin mendapat bantuan dana bantuan sosial banjir mengajukan dokumen/berkas ke kantor Kelurahan lewat Pokmas sesuai dengan yang telah di informasikan sebelumnya. Kemudian data yang diberikan masyarakat akan dikelola oleh pelaksana kebijakan dan apabila ada dokumen/berkas yang diberikan masih kurang lengkap, maka akan dikembalikan lagi kepada pihak yang bersangkutan agar dilengkapi kembali. Dan apabila

dokumen/berkas tersebut sudah memenuhi standar maka implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan banjir sudah dapat oleh pihak implementor karena SOP sudah ada namun pelaksanaannya terkadang tidak sesuai.

- b. Sumber daya : Faktor sumber daya mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun jelasnya dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan menjelaskan bahwa kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan masih kurang memadai dilihat dari tugas kerja yang ada, namun sumber daya finansial seperti rumah, uang tunai kelengkapan lainnya sudah tersedia secara memadai. Ada beberapa masyarakat sudah merasakan hasil dari sumber daya finansial tersebut, namun pemerintah telah memberikan secara bertahap karena biaya tersebut di ambil dari APBN/APBD.

Pembahasan Hasil Penelitian

Kebijakan pelaksanaan Program Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir merupakan kebijakan yang dilakukan berdasarkan Dalam UU Nomor

11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial serta melindungi masyarakat dari risiko-risiko sosial yang mungkin timbul. Untuk melaksanakan hal tersebut, negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan spesifik. Khusus untuk penjaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memiliki satu pos yang dinamakan bantuan sosial (Bansos) di dalam APBN. . Enam variabel tersebut akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir di Kecamatan Tikala.

a) Variabel komunikasi : Sesuai pernyataan yang disampaikan oleh informan bahwa informasi tentang pendistribusian dana bantuan sosial banjir sudah disampaikan lewat Pokmas atau kepala lingkungan, namun ternyata masih ada masyarakat yang mendengar informasi secara tidak langsung dari pemerintah/pelaksana kebijakan, hal tersebut menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah bahkan Pokmas sendiri kepada masyarakat masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan informasi

kepada masyarakat secara transparan dan jelas, khususnya mengenai kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir yang dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahkan teori Donald van Meter dan Carl van Horn mengemukakan secara jelas bahwa salah satu hal yang dapat mempengaruhi proses implementasi adalah aspek komunikasi apabila komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat atau sesama pemerintah belum berjalan dengan maksimal atau belum dilakukan dengan intensif maka akan sangat berpengaruh dengan implementasi kebijakan, dan hal tersebut nyata terjadi dalam implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal menyebabkan sebagian masyarakat belum mendengar informasi tentang kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir.

b) Variabel sumber daya : Penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan masih kurang memadai dilihat dari potensi kerja yang ada, kurangnya sumber daya manusia dalam implemenatsi kebijakanmdapat mempengaruhi implementasi dan kinerja dari kebijakan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Donald van Meter dan Carl van Horn, namun sumber daya finansial seperti rumah, uang

tunia dan kelengkapan lainnya sudah tersedia secara memadai, itu artinya dalam proses implementasi kebijakan tidak mengalami kendala dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam proses implementasi kebijakan. Masyarakat tidak lagi dibebankan biaya dalam pengurusan dokumen dana bantuan sosial banjir karena biaya pelaksanaan kebijakan ini diambil dari APBN/APBD hal ini dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 & Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Pedoman Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN/APBD, itu artinya pemerintah kecamatan telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada.

- c) Variabel lingkungan ekonomi sosial dan politik : Dalam penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa aspek lingkungan ekonomi sosial dan politik sudah sangat baik, pembangunan masih sementara berlanjut di daerah Pandu, segenap pihak diikuti sertakan dan masing-masing mempunyai peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan hasil dari pembangunan yang ada di kelurahan Pandu dapat dinikmati oleh masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan hidup.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dideskripsikan di dalam bab iv tentang implementasi kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian yang

dilihat dari proses implementasi dan hasil dari kebijakan sebagai berikut :

Proses implementasi yang dilakukan dikantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado) dilihat dari 6 variabel yaitu : 1) Komunikasi antar organisasi atau implementor dengan masyarakat belum berjalan dengan maksimal, dimana ada beberapa pokmas bahkan kepala lingkungan sendiri kurang menerima informasi secara langsung dari pihak konsultan/fasilitator dari pelaksana kebijakan dan bahkan ada masyarakat juga masih belum mendengar sudah sejauh mana kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir itu dilaksanakan 2) Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan belum memadai atau tidak kompeten dalam bidangnya, namun sumber daya finansial sudah cukup memadai 3) Disposisi atau sikap pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah cukup baik dilihat dari segi kesopanan dan keramahan para pelaksana kebijakan, namun sikap jujur dari para pelaksana kebijakan masih dikatakan sangat amat kurang 4) Karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan belum berjalan dengan maksimal dimana mekanisme pelaksanaan kebijakan tidak mengikuti SOP yang ada, terutama mengenai ketepatan waktu sehingga menyebabkan pendistribusian dana bantuan sosial banjir terlambat diberikan kepada masyarakat 5) Standar dan sasaran kebijakan dalam pelaksanaan sudah berjalan secara jelas dan tepat. 6) Kondisi ekonomi sosial dan politik sangat kondusif dalam pelaksanaan kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi implementasi kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di Kecamatan Tikala Khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado. Adapun saran-saran sebagai tersebut yaitu :

1. Bagi BPBD yang ada di Kota Manado hendaknya dapat memperhatikan sumber daya Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir ini agar lebih kompeten dan professional. Untuk semua para implementor yang terlibat baik di tingkat kecamatan dan kelurahan serta lingkungan yang ada, haruslah diberi pendampingan khusus agar kelangsungan pendistribusian dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi pemerintah kecamatan Tikala hendaknya dapat lebih lagi memaksimalkan perannya selaku agen pelaksana di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab melakukan koordinasi kepada pemerintah kelurahan serta kepala lingkungan. Koordinasi berupa pertemuan atau melalui rapat yang harus lebih sering dilakukan guna terbangunnya komunikasi yang baik. Hal ini dilakukan agar berkurang/meminimalisir ketidakjelasan informasi pada implementor, selain itu pengawasan pendistribusian dana dapat berlangsung lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah
- Andreson, James E. 2003. *Public Policymaking*. Fifth. USA : Houghton Mifflin Company
- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Chaizi Nasucha, 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta : PT. Grasindo
- Edward III, George C. 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Eyestone, Robert. 1971. *The Treads of Public Policy : A Study in Policy Leadership*. Indianapolis : Boobs-Merrill.
- Grindle, Merilee S. 2005. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey : Princetown University Press
- Harold D. Lasswell. 2009. *Structure an Funtion of Communication in Societ* dalam. Wilbur Schramm. (Ed)
- SUMBER LAINNYA**
- Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011 & Nomor 39 Tahun 2012 pasal 1
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
- Surat Keputusan Walikota Nomor 30 Tahun 2014. Tentang Rumah Rusak, Sedang, Ringan, dan Berat
- Surat Keputusan Walikota Nomor 101 A Tahun 2016 Tentang Penyaluran Dana Bantuan Banjir